

STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK GENERASI MILLENNIAL DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

Rainata Pattipi

NPP. 31.1054

Asdaf Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan Fakultas Politik Pemerintahan

Email: rainatapattipi@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Political participation in a democratic country is an indicator of the legitimate implementation of state power by the people (popular sovereignty), which is reflected in their involvement in democratic processes such as general elections. The younger generation has an important role in development and social transformation. However, to be able to play an effective role, they need to have a good understanding of political issues and awareness of the importance of political participation in country development. KESBANGPOL Mimika Regency has the responsibility to help increase the political participation of the younger generation. **Objective** This research aims to determine the strategy of national and political unity bodies in increasing the political participation of the millennial generation in Mimika district, Central Papua province. **Method** The independent variable used in this research is the use of social media. This research uses a commonly used method, namely Qualitative. Researchers use a qualitative approach which is flexible for data in the field because researchers will be directly involved in the field. **Results/Findings** In this research, the results found that Kesbangpol in Mimika Regency can increase the political involvement of the millennial generation by providing political education, utilizing technology, collaborating with various parties, empowering them through training, and accommodating their ideas and aspirations. **Conclusion** Kesbangpol Mimika Regency's strategies effectively enhance the political participation of the millennial generation by leveraging education, technology, collaboration, empowerment, and accommodation of youth aspirations.

Keywords: Millennial Generation, Participation, Politics, Roles, Strategy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Partisipasi politik dalam sebuah negara demokratis merupakan indikator dari implementasi kekuasaan negara yang sah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang tercermin

dalam keterlibatan mereka dalam proses-proses demokrasi seperti Pemilihan Umum. Generasi muda memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan transformasi sosial. Namun, untuk dapat berperan secara efektif, mereka perlu memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik dan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik dalam pembangunan negara. KESBANGPOL Kabupaten Mimika memiliki tanggung jawab untuk membantu meningkatkan partisipasi politik generasi muda. **Tujuan** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi badan kesatuan bangsa dan politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi millennial di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. **Metode** Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penggunaan media sosial. Penelitian ini menggunakan metode yang umum digunakan yaitu Kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat fleksibel untuk data di lapangan karena peneliti akan secara langsung terjun ke lapangan. **Hasil/Temuan** Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa Kesbangpol di Kabupaten Mimika dapat meningkatkan keterlibatan politik generasi millennial dengan menyelenggarakan pendidikan politik, memanfaatkan teknologi, berkolaborasi dengan berbagai pihak, memberdayakan melalui pelatihan, serta mengakomodasi ide dan aspirasi mereka. **Kesimpulan** Strategi yang dilakukan oleh Kesbangpol Kabupaten Mimika efektif dalam meningkatkan partisipasi politik generasi millennial dengan memanfaatkan pendidikan, teknologi, kolaborasi, pemberdayaan, dan akomodasi aspirasi generasi muda.

Kata kunci: Generasi Millennial, Partisipasi, Peran, Politik, Strategi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partisipasi politik dalam sebuah negara demokratis merupakan indikator dari implementasi kekuasaan negara yang sah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang tercermin dalam keterlibatan mereka dalam proses-proses demokrasi seperti Pemilihan Umum. Tingkat partisipasi politik yang tinggi menunjukkan bahwa warga mengikuti, memahami, dan terlibat dalam urusan negara. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah umumnya menandakan kurangnya apresiasi atau minat warga terhadap urusan atau kegiatan negara (Wardhani, 2018). Partisipasi politik melibatkan aktivitas warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung (tanpa disengaja), yang terkait dengan kebijakan pemerintah, yang dapat dilakukan secara spontan oleh individu atau dimobilisasi oleh kelompok (Anthonius, 2012).

Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan partisipasi politik generasi muda. Kabupaten Mimika, yang terletak di wilayah yang strategis di Papua, memiliki potensi yang besar dalam pembangunan serta memiliki beragam tantangan yang harus dihadapi, termasuk masalah-masalah sosial dan politik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan partisipasi yang aktif dari semua segmen masyarakat, termasuk kaum muda.

KESBANGPOL Kabupaten Mimika memiliki tanggung jawab untuk membantu meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam berbagai kegiatan dan program yang ditawarkan oleh KESBANGPOL. Melalui pendidikan politik, generasi muda dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik, hak-hak politik mereka, dan pentingnya partisipasi dalam pembangunan negara.

Selain itu, KESBANGPOL juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan dan memobilisasi massa, terutama di kalangan pemuda yang terhubung secara digital. Dengan memanfaatkan media sosial, KESBANGPOL dapat mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi politik generasi muda.

Pelaksanaan pemilihan umum membutuhkan partisipasi dari seluruh warga negara. Generasi muda memiliki potensi untuk menggerakkan kemajuan bangsa Indonesia dengan keunggulan yang dimilikinya, seperti kekuatan fisik, semangat, dan kecerdasan yang sehat untuk memajukan Negara (Ayubi & Irawati, 2022). Generasi muda merupakan kelompok yang selalu menjadi faktor penting dalam setiap periode. Peran mereka dalam dinamika kehidupan sosial-politik suatu bangsa tidak dapat diabaikan. Sejarah mencatat bahwa pemuda selalu memiliki peran kunci dalam peristiwa revolusi sosial-politik, seperti Gerakan Sumpah Pemuda pada Tahun 1928, perjuangan menuju kemerdekaan pada Tahun 1945, peristiwa 1966 yang menggulingkan orde lama, dan gerakan reformasi pada Tahun 1998. Peran generasi muda dalam pemilu tidak hanya karena jumlah pemilih yang signifikan, tetapi juga karena mereka menjadi target bagi peserta pemilu. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memiliki pemahaman yang baik tentang politik agar mereka dapat terlibat dengan bijaksana dan menghindari politik praktis (Triyono et al., 2017).

Dalam Sambutan Bupati Mimika, Beliau menjelaskan bahwa Kabupaten Mimika memiliki 18 Distrik, 152 Kampung Kelurahan, luas wilayah 21.633 Km². Dengan jumlah penduduk per Desember 2023 semester I adalah 313.016 jiwa yang terdiri dari berbagai suku, baik asli amungme, kamoro, 7 (tujuh) suku kekerabatan dan semua suku yang ada di nusantara sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Mimika merupakan miniatur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akan tetapi menurut data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika Jumlah penduduk Mimika per Tahun 2021 adalah sebanyak 311.969 Jiwa dimana dapat dilihat lebih rinci sebagai berikut:

Kecamatan Mimika	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Total		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Agimuga	533	474	480	517	402	408	1 050	876	-
Amar	1 062	1 085	1 150	1 041	970	923	2 103	2 055	-
Alama	1 021	1 136	1 098	903	909	985	1 924	2 045	-
Hoya	649	580	587	712	517	525	1 361	1 097	-
Iwaka	4 048	5 881	5 953	3 542	5 100	5 180	7 590	10 981	-
Jila	656	979	991	689	776	788	1 345	1 755	-
Jita	936	817	827	761	709	720	1 697	1 526	-
Kuala Kencana	9 776	14 597	14 776	8 241	13 177	13 383	18 017	27 774	-
Kwamki Narama	3 898	7 104	7 191	3 654	6 646	6 750	7 552	13 750	-
Mimika Barat	1 454	1 764	1 786	1 324	1 202	1 221	2 778	2 966	-
Mimika Barat Jauh	1 139	1 108	1 122	1 064	922	936	2 203	2 030	-
Mimika Barat Tengah	1 200	1 225	1 240	1 238	1 095	1 112	2 438	2 320	-
Mimika Baru	59 110	76 571	77 512	50 443	66 338	67 381	109 553	142 909	-
Mimika Tengah	1 843	2 223	2 250	1 797	2 037	2 069	3 640	4 260	-
Mimika Timur	4 285	5 387	5 453	3 562	4 792	4 867	7 847	10 179	-
Mimika Timur Jauh	1 892	1 921	1 945	1 845	1 599	1 624	3 737	3 520	-
Tembagapura	15 124	16 445	16 647	4 883	6 577	6 694	20 007	23 022	-
Wania	13 071	31 253	31 637	11 776	27 651	28 084	24 847	58 904	-
Kabupaten Mimika	121 697	170 550	172 645	97 992	141 419	143 650	219 689	311 969	-

Data ini masih belum terkendala dan belum terupdate di website dikarenakan belum adanya pendataan kembali oleh BPS sebagai penanggung jawab data Kependudukan yang ada. Data yang ada hanya data dari Tahun 2016-2021 belum ada data terupdate yang ada pada website BPS Kabupaten

Mimika. Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan Pendataan ini menjadi salah satu faktor utama terhambatnya Update data pada BPS Kabupaten Mimika.

Pemilu 2024 akan berisiko jika generasi muda kurang terlibat dalam politik, terutama jika ada yang memilih untuk golput. Hal ini dapat menyebabkan krisis dalam dunia politik karena tidak ada generasi yang siap untuk melanjutkan pembangunan negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. (Octavia et al., 2021) Seperti yang terjadi Dalam mengevaluasi tingkat partisipasi politik masyarakat, secara umum, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan pada Tahun 2009. Namun, terjadi peningkatan yang signifikan pada Tahun 2015 dan 2019.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta evaluasi dan pelaporan di bidang tersebut. KESBANGPOL Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah bertujuan untuk mewujudkan rasa persatuan di masyarakat melalui nilai-nilai kebangsaan dan politik sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi KESBANGPOL Kabupaten Mimika meliputi peningkatan optimalisasi pembinaan nilai kebangsaan dan politik di berbagai lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal; menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan persatuan, terutama pada generasi muda di Kabupaten Mimika; serta meningkatkan profesionalisme dalam tata kelola pelayanan kepada masyarakat.

KESBANGPOL Kabupaten Mimika memiliki salah satu program Menumbuhkan Wawasan Kebangsaan dan Persatuan Kepada Masyarakat Khususnya Pemuda Kabupaten Mimika. Melihat dinamika yang terjadi belakangan ini generasi muda (milenial) masih banyak sekali yang tidak melek dengan politik, ataupun apatis terhadap kehidupan politik yang terjadi. Kehidupan generasi millennial yang demikian merupakan dampak dari kurangnya pendidikan politik dalam mengajak para generasi millennial ini untuk turun serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik yang ada.

Berdasarkan uraian pada tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK GENERASI MILLENNIAL DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH”**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun partisipasi politik merupakan indikator utama dari implementasi kekuasaan negara yang sah oleh rakyat, data menunjukkan bahwa partisipasi politik generasi muda di Kabupaten Mimika masih rendah. Generasi muda di Kabupaten Mimika belum sepenuhnya menyadari pentingnya partisipasi politik dalam pembangunan negara. Padahal, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika kehidupan sosial-politik bangsa. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih signifikan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik di kalangan generasi muda di Kabupaten Mimika.

KESBANGPOL Kabupaten Mimika memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda, namun strategi yang digunakan hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Meskipun KESBANGPOL telah melaksanakan berbagai program, seperti pendidikan politik dan pemanfaatan media sosial, tingkat partisipasi politik generasi muda masih rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas strategi yang digunakan oleh KESBANGPOL dalam

mencapai tujuan mereka. Kesenjangan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi dan mengembangkan strategi baru yang lebih efektif.

Kurangnya data terbaru tentang jumlah penduduk dan partisipasi politik di Kabupaten Mimika juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang belum terupdate mengindikasikan adanya masalah dalam pengumpulan dan pengelolaan data kependudukan. Tanpa data yang akurat, sulit bagi KESBANGPOL untuk merancang dan melaksanakan program yang tepat sasaran. Kesenjangan ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan sistem pengelolaan data di Kabupaten Mimika.

Pemilu 2024 berisiko jika generasi muda di Kabupaten Mimika memilih untuk tidak terlibat dalam politik. Kurangnya partisipasi dari generasi muda dapat menyebabkan krisis dalam dunia politik karena tidak ada generasi yang siap untuk melanjutkan pembangunan negara. Meskipun sejarah menunjukkan bahwa generasi muda selalu memiliki peran kunci dalam peristiwa revolusi sosial-politik, kenyataannya saat ini banyak generasi muda yang apatis terhadap politik. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan relevan untuk menarik minat generasi muda terhadap partisipasi politik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berfokus pada strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Johan Pahlawan mengungkap beberapa temuan penting. Dalam studi yang dilakukan oleh (Huljana & Baharudin, 2022), strategi Bakesbangpol Aceh Barat dianalisis menggunakan teori Chandler, Jr yang diadaptasi dari buku J. Salusu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakesbangpol telah melakukan sosialisasi dan forum diskusi sebagai bagian dari formulasi dan sasaran jangka panjang. Namun, partisipasi politik pemilih pemula masih rendah, dan terdapat kekurangan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang menghambat kinerja mereka dalam proses persiapan kegiatan partisipasi politik.

Penelitian lainnya oleh (Bagus Adnyanaesa & Sutama, 2023) mengkaji peranan Bakesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Berdasarkan Peraturan Walikota No.85 Tahun 2013, Bakesbangpol berperan dalam memberikan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik generasi muda. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan struktur organisasi, kurangnya dana, dan pola pikir generasi muda menjadi hambatan utama dalam upaya ini. Meskipun demikian, peran Bakesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda secara keseluruhan dianggap berjalan baik, dengan adanya sosialisasi dan pendidikan politik yang efektif.

Studi lain oleh (Mulyana & Tambunan, 2021) menganalisis partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik James Roseau dan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Temuan penelitian menunjukkan peningkatan partisipasi politik masyarakat sebesar 14,66% dari tahun 2015 hingga 2020, yang diakibatkan oleh kesadaran berpartisipasi politik masyarakat Merauke. Peneliti merekomendasikan Bakesbangpol untuk meningkatkan sosialisasi menggunakan media massa lokal dan bekerjasama dengan KPU, pemerintah daerah, dan partai politik untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Penelitian oleh (Nurhayati et al., 2023) berfokus pada peran Bakesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo. Dengan menggunakan metode kualitatif

dan teknik triangulasi, penelitian ini menemukan bahwa Bakesbangpol Sukoharjo telah berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan fasilitas dan bantuan pendidikan politik, serta fokus pada sosialisasi politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan meliputi pengetahuan politik, pengaruh keluarga, stimulasi politik, dan pengaruh media sosial.

Penelitian oleh (Nurfitriana et al., 2021) di Kabupaten Musi Banyuasin menyoroti efektivitas penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula yang dilakukan oleh Bakesbangpol. Meskipun kegiatan penyuluhan berjalan baik dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran politik masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran yang ada belum mencukupi untuk mencakup seluruh wilayah yang luas dan jarak antar-kecamatan yang berjauhan. Peneliti merekomendasikan peningkatan kerjasama dengan pihak terkait dan penambahan staf serta sumber daya manusia untuk melakukan penyuluhan yang berkelanjutan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kepuasan masyarakat. (Aryandono et al., 2024) dalam studi mereka menganalisis penerapan prinsip good governance di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Dengan menggunakan teknik sensus, mereka melibatkan 60 organisasi masyarakat sebagai responden dan mengumpulkan data melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun sumber daya manusia telah melaksanakan tugas dengan baik, sikap dalam melayani masyarakat perlu diperbaiki dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sangat baik.

Studi lainnya oleh (Hakim & Dewanti, 2020) menyoroti partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat terlibat dalam pencegahan konflik sosial. Temuan mereka menunjukkan bahwa FKDM berperan penting dalam mengumpulkan informasi yang dapat mencegah gangguan kehidupan sosial dan menyampaikan data tersebut kepada pemerintah lokal.

(Dhany Asmara Hidayat et al., 2023) dalam penelitian mereka mengkaji implementasi gaya kepemimpinan demokratis di Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif melalui observasi dan wawancara. Mereka menemukan bahwa implementasi gaya kepemimpinan demokratis belum optimal karena masih adanya kendala komunikasi dan keputusan bersama yang kurang tepat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan sesuai dengan lingkungan kerja.

(Setiawan et al., 2020) meneliti strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul guna menghadapi ancaman internal dan eksternal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mereka menemukan bahwa strategi yang dilakukan meliputi pendidikan dan pelatihan bela negara yang masih konvensional. Mereka menyarankan optimalisasi teknologi dan pengembangan literasi digital sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Penelitian oleh (Pelealu et al., 2022) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara fokus pada pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas kerja pegawai. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan teknik sampling jenuh, mereka menemukan bahwa sarana dan prasarana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai. Analisis regresi linear

sederhana menunjukkan bahwa sarana dan prasarana berkontribusi sebesar 84,3% terhadap efektivitas kerja, menandakan pentingnya fasilitas yang memadai dalam mendukung kinerja pegawai.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan strategi yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam meningkatkan partisipasi politik generasi milenial di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap generasi milenial di kawasan yang secara geografis dan demografis memiliki tantangan tersendiri. Sebagai kelompok yang seringkali dianggap apatis terhadap politik, memahami pendekatan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik milenial di wilayah ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi strategi serupa di daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, generasi milenial menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses informasi yang terbatas dan kesenjangan digital. Penelitian ini menggali upaya Kesbangpol dalam mengatasi hambatan tersebut melalui penggunaan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk edukasi politik dan penyebaran informasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai efektivitas strategi digital yang diimplementasikan di daerah dengan infrastruktur yang terbatas, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Penelitian ini juga menekankan pada pentingnya pendekatan budaya dalam strategi peningkatan partisipasi politik. Mengingat keragaman budaya dan etnis di Papua Tengah, Kesbangpol harus mengembangkan program yang sensitif terhadap konteks lokal dan mampu mengakomodasi perbedaan budaya dalam upaya mereka. Kebaruan ilmiah di sini adalah eksplorasi bagaimana adaptasi budaya dapat diintegrasikan ke dalam strategi politik untuk menarik minat generasi milenial, yang merupakan pendekatan yang belum banyak diadopsi dalam studi-studi sebelumnya mengenai partisipasi politik.

Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur keberhasilan strategi yang diterapkan. Dengan menggunakan metode survei, wawancara mendalam, dan analisis data sekunder, penelitian ini tidak hanya menyediakan data empiris mengenai tingkat partisipasi politik generasi milenial di Kabupaten Mimika, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi partisipasi tersebut. Pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur mengenai strategi partisipasi politik yang berbasis pada bukti empiris, khususnya di wilayah yang kurang terwakili dalam penelitian sebelumnya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi milenial di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dengan fokus pada pendekatan yang digunakan oleh Kesbangpol, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif generasi milenial dalam proses politik. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana strategi yang berbeda dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik di kalangan milenial dan mengidentifikasi praktek terbaik yang dapat diadopsi oleh lembaga serupa di daerah lain.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi strategi Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik generasi milenial melalui media sosial di Kabupaten Mimika. Dengan memahami hambatan dan peluang yang ada, penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif. Analisis ini akan mencakup berbagai aspek, seperti akses dan penggunaan teknologi, relevansi konten yang disajikan melalui media sosial, serta respon dan keterlibatan milenial terhadap inisiatif politik yang dijalankan oleh Kesbangpol.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena yang diamati dan memahami dengan mendalam gejala, fakta-fakta, serta fenomena yang terkait. Dalam konteks pelaksanaan strategi Bakesbangpol, metode deskriptif kualitatif memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang relevan dengan partisipasi politik generasi millennial melalui media sosial (Murdiyanto, 2020).

Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam rancangan ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk memahami fenomena partisipasi politik generasi millennial melalui media sosial, serta strategi yang dilakukan oleh Bakesbangpol dalam konteks tersebut (L.J Moleong, 2022).

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer, peneliti melaksanakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung di lapangan yaitu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dengan melibatkan para pegawai yang berada di instansi tersebut (Rijali, 2019). Sedangkan pada data sekunder, peneliti melaksanakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen, arsip dan laporan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Dokumen yang dimaksud seperti dari surat kabar, laporan resmi, arsip, dan dokumen pribadi lainnya (jurnal, buku harian, email, surat) serta materi audio dan visual seperti foto, video atau benda seni yang dapat menjadi data dan informasi pada penelitian yang dilakukan peneliti dengan metode kualitatif (Bungin, 2007).

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Purposive sampling adalah teknik yang digunakan untuk menentukan informan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang sesuai dengan tujuan dan topik penelitian. Dengan teknik ini, peneliti dapat memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh melalui beberapa metode, terutama melalui proses wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan implementasi Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bakesbangpol) dalam meningkatkan partisipasi politik generasi millennial melalui media social (Dr.Sudaryono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Partisipasi Politik Generasi Milineal

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aksi individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam urusan politik, termasuk dalam pemilihan pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Budiardjo, 2015). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Budiardjo, partisipasi politik juga mencakup memberikan suara dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin serta menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil.

Partisipasi politik sering kali terkait dengan kesadaran politik, di mana individu yang sadar akan hal ini akan menuntut hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemerintahan. Kesadaran politik masyarakat menjadi faktor penentu dalam tingkat partisipasi politik, menunjukkan tingkat pengetahuan dan kesadaran individu terhadap hak dan kewajiban yang terkait dengan konteks politik dan masyarakat. Kesadaran politik juga mencerminkan seberapa aktif seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik (Tarsidi dkk., 2019). Kesadaran politik biasanya diperoleh melalui pendidikan, keanggotaan dalam organisasi, dan pengalaman sosial-politik, bahkan dari tokoh-tokoh masyarakat terkemuka.

2. Partisipasi Politik Pemilih Milenial

Generasi Milenial, yang sering disebut sebagai Generasi Y atau Generasi Langgas, merupakan kelompok demografi setelah generasi X (Gen-X), dengan rentang kelahiran antara Tahun 1980-an hingga 2000. Mereka termasuk dalam kategori usia 17 hingga 37 Tahun pada Tahun ini (Nindyati, 2017). Perkembangan generasi ini sangat cepat, dengan dampak positif dan negatifnya. Kemajuan teknologi memungkinkan mereka menyerap informasi dengan cepat dari berbagai sumber, namun kecepatan tersebut juga dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak valid, seperti pada pemilu 2019 di mana berita hoaks tersebar luas di media sosial, menciptakan miskomunikasi di kalangan generasi milenial. Selain itu, media online seperti WhatsApp, Line, dan Instagram menjadi sumber utama informasi bagi mereka dalam menentukan pilihan politik.

Peran generasi milenial dalam ranah politik tidak dapat diabaikan (Tarsidi dkk., 2019). Menurut Potehadi (2019), pada Tahun 2019, generasi milenial memiliki peran penting dalam politik yang membutuhkan kecakapan dalam media, responsif, kreatif, dan advokatif. Sebagai penerus bangsa, keterlibatan generasi milenial dalam politik sangat penting, karena jika partisipasi mereka rendah, siapa yang akan melanjutkan perpolitikan negara? Penelitian oleh Christiany Juditha dan Josep Darmawan tentang “Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milenial” menunjukkan bahwa media online menjadi pilihan utama generasi milenial dalam mengakses informasi politik, dengan 80,5% hingga 100% responden menggunakan media tersebut.

3. Partisipasi Politik Pemilih Milenial Pada Pemilihan Umum Tahun Di Indonesia

Partisipasi generasi milenial dalam Pemilu 2019 dianggap sangat penting karena mereka merupakan faktor penentu kesuksesan pemilihan tersebut. Dengan jumlah pemilih milenial mencapai 35-40 persen, mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan masa depan pemimpin. Partisipasi politik generasi milenial menjadi sangat substansial karena jumlah suara yang diberikan oleh mereka dalam pemilihan tersebut (Juditha & Darmawan, 2018). Selain karena jumlahnya yang besar, generasi milenial juga memiliki pengaruh yang kuat dalam era informasi, di mana segala aktivitasnya

sangat terkait dengan internet dan media online. Oleh karena itu, generasi milenial dianggap sebagai agen perubahan yang penting dalam dunia politik, karena mereka dapat menembus dominasi kepentingan politik yang sudah mapan oleh pihak tertentu.

Dengan potensi pengaruh yang besar, generasi milenial menjadi target utama bagi tim sukses pasangan calon. Namun, kurangnya informasi yang akurat dan penyebaran berita hoaks yang masih marak di media massa membuat kebingungan di kalangan pemilih milenial (Septiadi dkk., 2020). Hal ini menurunkan motivasi mereka untuk memberikan suara, karena mereka merasa ragu terhadap setiap calon yang diusung. Selain itu, pola komunikasi yang berbeda-beda di setiap daerah juga menjadi kendala bagi tim sukses dalam memahami pola komunikasi lokal yang dapat lebih diterima oleh masyarakat.

4. Jumlah Penduduk Generasi Milenial Pada Kabupaten Mimika

Menurut data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022, mayoritas penduduk Kabupaten Mimika menganut agama Kekristenan, terdiri dari 48,54% penganut agama Protestan dan 22,90% penganut agama Katolik. Sementara itu, sebanyak 28,75% penduduk menganut agama Islam. Minoritas lainnya termasuk penganut agama Buddha sebanyak 0,05% dan agama Hindu sebanyak 0,08%. Kabupaten Mimika juga dihuni oleh beberapa suku asli, seperti suku Amung di wilayah pegunungan dan suku Mimika (Kamoro) serta suku Sempan di wilayah pantai. Selain itu, terdapat pula beragam suku dan etnis dari berbagai daerah di Indonesia yang telah menetap di Mimika selama puluhan Tahun. Mereka berasal dari berbagai suku, seperti Jawa, Makassar, Ambon, Bugis, Buton, Toraja, serta suku-suku lainnya seperti Minahasa, Kei, Minang, Batak, dan Bali. Kehadiran berbagai suku ini, terutama di wilayah perkotaan dan daerah pertambangan, menjadi magnet bagi pencari kerja dan pedagang.

3.2. Faktor Pendukung

Aliansi Politik

Mendekati Pilkada gubernur yang akan digelar pada bulan November mendatang, delapan partai politik telah membentuk sebuah aliansi yang disebut "Papua Bersatu" untuk mengkoordinasikan dukungan bagi pasangan calon yang akan bertarung memperebutkan jabatan tertinggi di wilayah tersebut. Melalui aliansi ini, partai-partai tersebut memiliki kewenangan untuk menghimpun, memverifikasi, dan menetapkan calon-calon potensial untuk posisi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua periode 2005-2010.

Kedelapan parpol tersebut adalah Partai PPNU, PBR, PNI Marhaenisme, PPDI, Pelopor, PKB, PAN dan PPDK Acara pendeklarisan dilaksanakan jumat (01/07) di ruang meeting hotel Yasmin Jayapura yang dihadiri ketua DPW/DPD dan DPC, serta pengurus dari 8 parpol tersebut. Dalam surat keputusan bersama yang dibacakan ketua DPD Partai Pelopor Provinsi Papua, Simson Kadun, SE, menyatakan dengan adanya pembentukan aliansi ini maka keputusan politik tentang bakal calon kepala daerah yang aka diusulkan adalah keputusan partai politik tentang bakal calon kepala daerah yang akan diusulkan adalah keputusan partai secara keseluruhan, maka diperlukan adanya kerjasama antara partai-partai anggota Aliansi Provinsi Papua untuk secara bersama memeriksa dan menetapkan Bakal calon Kepala Dearah yang akan diusulkan melalui DPRP Papua. Pembentukan aliansi ini sendiri tetap berpedoman pada UU No.32 Tahun 2004 tentang prosedur Pemilihan Kepala Daerah dan PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Hal yang perlu diperhatikan, sebagaimana isi dalam suarat keputusan bersama,yakni setelah

terbentuk presidium dengan kesepakatan bersama dan ditanda tangani 8 Partai Politik, tidak tertutup bagi partai politik lain yang ingin bergabung.

3.3. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan ada terjadinya praktek kkn oleh bupati timika dimana biasanya orang-orang yang dipekerjakan di dinas-dinas merupakan orang-orang kepercayaan dari bupati timika itu merupakan penghambat utama dalam masalah yang terjadi di Timika. Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyelenggarakan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan tema “Penguatan Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Sukses Pemilu dan Pilkada Tahun 2024”, Rabu (22/11/2023) di Timika.

Dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Septinus Timang, S.Sos., M.H, sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi didampingi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Alfasiah, S.STP., M.Si, Kasat Intel Polres Mimika AKP. Budi Santoso S.Sos dan Kasdim 1710 Mimika Mayor Munir, sebagai narasumber. Dalam laporan panitia disampaikan maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan pilar-pilar kebangsaan bagi warga masyarakat Mimika.

Sementara itu, dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh staf ahli Bupati mengatakan, Sejumlah 18 Distrik, 152 Kampung Kelurahan, luas daerah 21.633 Km². Menjadikan Kabupaten Mimika termasuk Kabupaten yang sangat Luas diikuti dengan jumlah penduduk hampir 315 ribu jiwa yang terdiri dari bermacam suku, baik asli amungme, kamoro, 7 (7) suku kekerabatan serta seluruh suku yang terdapat di nusantara sehingga bisa dikatakan kalau Kabupaten Mimika ialah miniatur Negeri Kesatuan Republik Indonesia.

Selain perbedaan suku bangsa, ras dan agama tantangan selanjutnya adalah laju modernisasi perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks dan memberikan kemudahan bagi kehidupan, berbagai pengaruh negatif juga terdapat didalamnya, yang mampu menggerus nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya Septinus menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini diadakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kecintaan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasa nasionalisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, Serta nilai-nilai patriotisme pada masyarakat di Kabupaten Mimika.

3.4. Pelaksanaan Pendidikan Politik Generasi Muda

1. Peran Keluarga

Seperti yang disampaikan oleh Maran (2001:135-136) tentang agen sosialisasi politik, keluarga merupakan salah satu agen penting dalam pendidikan politik. Keluarga berperan sebagai sumber informasi politik, karena seringkali terjadi diskusi di dalam keluarga yang berkontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman politik generasi muda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang narasumber, keluarga dianggap sebagai aktor utama dalam memengaruhi keputusan pemilihan calon dan memberikan informasi mengenai latar belakang politik. Tanpa penjelasan yang diberikan oleh orang tua

atau keluarga, seseorang mungkin tidak akan memiliki pemahaman tentang pentingnya politik bagi demokrasi.

2. Peran Lingkungan Tempat Beraktifitas

Selain keluarga, lingkungan juga memiliki dampak yang besar terhadap pemahaman politik para pemilih muda di Kabupaten Mimika dalam mengambil bagian dalam Pileg 2024. Ragam kategori pemilih muda sangat beragam, termasuk mereka yang masih bersekolah, kuliah, dan bahkan yang sudah bekerja. Lingkungan di mana mereka beraktivitas ternyata turut memengaruhi informasi politik yang mereka terima.

3. Peran Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan juga merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan politik. Tempat pergaulan seringkali menjadi sumber informasi politik yang berarti bagi individu. Seperti yang disampaikan oleh seorang narasumber, tempat kuliah dan berbagai organisasi yang pernah diikuti dapat memengaruhi pemahaman tentang politik seseorang, termasuk bagaimana politik memengaruhi berbagai aspek kehidupan dan mengatur segala pola yang terkait dengan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki kemampuan untuk mengubah pandangan seseorang terhadap kehidupan politik.

3.5. Jumlah Pemilih Muda

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pendidikan politik dalam memengaruhi partisipasi pemilih muda, khususnya pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Mimika.

1. Kabid Kepegawaian

Untuk saat ini lebih banyak partisipasi gen milenial dan z yang aktif menggunakan sosial media, maka Kesbangpol membuat program untuk menyampaikan informasi seputaran politik namun hanya terkendala di SDM dibidang program kerja untuk menjalankan sosial media yang dimaksud, dikarenakan generasi sekarang lebih gampang di gapai menggunakan sosial media, begitupun ada kekurangan yang dimana hanya 1 orang saja yang mengoperasikan sosial media itupun hanya website, untuk instagram dan lainnya sudah ada namun belum ada tenaga kerja yang dapat menjalankan sosial media tersebut, dan dibutuhkan pegawai yang masih muda seperti generasi milenial atau gen z karena untuk dizaman sekarang konten yang menarik lebih disukai orang, membuat orang tertarik.

2. Gen Milenial Perempuan

Orang Pertama

Badan Kesbangpol juga memiliki tim khusus yang bertugas dalam mengoperasikan media sosial, yaitu Sub Bagian Umum dan Program. Dengan demikian, akses terhadap informasi yang disampaikan melalui media sosial dapat diakses oleh siapa saja, termasuk generasi milenial. Dengan dimilikinya media sosial oleh generasi milenial, partisipasi mereka dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpol dapat meningkat secara efektif.

Orang Kedua

Kegiatan yang dilakukan Kesbangpol dalam upaya meningkatkan partisipasi politik meliputi sosialisasi langsung kepada masyarakat, terutama dalam konteks Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. Melalui media sosialnya, Kesbangpol dapat mencapai sasaran yang luas, termasuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kaum milenial.

Orang Ketiga

Upaya sosialisasi kebijakan dan kegiatan Kesbangpol kepada masyarakat telah dilakukan secara intensif, dengan menysasar lingkungan masyarakat di daerah Kabupaten Mimika. Hal ini menunjukkan bahwa Kesbangpol Kabupaten Mimika telah berupaya untuk memastikan informasi yang disampaikan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat setempat.

Orang Keempat

Meskipun media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik, terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya keterampilan dalam manajemen media sosial. Namun, dukungan penuh dari pemerintah daerah, adanya tim khusus yang mengelola media sosial, dan keterlibatan aktif masyarakat dapat menjadi faktor pendukung dalam penggunaan media sosial.

3. Gen Milenial Laki – Laki

Orang Pertama

Informasi yang disajikan melalui media sosial KESBANGPOL Kabupaten Mimika selalu terkini dan mengikuti perkembangan berita atau informasi yang sedang terjadi. Tujuan dari pemanfaatan media sosial ini adalah untuk membangun ruang partisipasi bagi masyarakat, baik melalui partisipasi dalam memberikan suara maupun dalam memberikan kritik dan saran.

Orang Kedua

KESBANGPOL dapat melakukan posting atau membuat konsep yang menarik dan memberikan wawasan politik kepada masyarakat sekaligus sebagai cara mempromosikan akun media sosial tersebut. Namun, menurut saya, penggunaan hanya website belum begitu efektif. Lebih baik lagi jika KESBANGPOL memanfaatkan media sosial lain seperti Instagram, Facebook, atau Twitter yang lebih sering digunakan oleh masyarakat. Meskipun demikian, faktor penghambat dalam penggunaan media sosial berbasis web adalah tidak semua kalangan masyarakat memiliki inisiatif untuk membuka website atau mencari informasi secara aktif. Namun, faktor pendukungnya adalah struktur website yang formal dan terstruktur dengan baik.

Orang Ketiga

Selama ini, visi dan misi KESBANGPOL Kabupaten Mimika telah dijalankan dengan baik, dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan politik di masyarakat. Melalui media sosial, seperti website dan aplikasi, KESBANGPOL aktif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, termasuk mengenai kegiatan yang dilakukan serta isu-isu terkini dalam bidang kebangsaan dan politik.

Orang Keempat

Selama ini, KESBANGPOL Kabupaten Mimika telah berhasil menjalankan visi dan misinya dengan baik. Berbagai kegiatan telah dilakukan, seperti koordinasi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan sejarah kebangsaan, dengan tujuan memperkuat wawasan kebangsaan dalam rangka suksesnya Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam meningkatkan partisipasi politik generasi milenial di Kabupaten Mimika melalui media sosial memiliki keefektifan yang signifikan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang melibatkan penggunaan platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan

Facebook berhasil menarik minat dan keterlibatan milenial dalam kegiatan politik lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Christiany Juditha dan Josep Darmawan (2018) yang juga menemukan bahwa media digital menjadi sumber utama informasi politik bagi generasi milenial, yang mendukung partisipasi politik mereka. Namun, berbeda dengan temuan Juditha dan Darmawan yang berfokus pada penggunaan media secara umum, penelitian ini lebih mendalami aspek strategi komunikasi yang spesifik diterapkan oleh Kesbangpol dalam konteks lokal Kabupaten Mimika.

Sebaliknya, temuan penelitian ini juga menunjukkan beberapa hambatan yang dihadapi dalam implementasi strategi tersebut, seperti penyebaran berita hoaks yang masih marak dan memengaruhi kepercayaan milenial terhadap informasi politik yang mereka terima. Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Septiadi dkk. (2020) yang juga menyoroti dampak negatif dari berita hoaks terhadap partisipasi politik generasi milenial. Namun, berbeda dengan studi terdahulu yang lebih bersifat deskriptif, penelitian ini memberikan analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor spesifik yang mendukung dan menghambat strategi komunikasi politik di Kabupaten Mimika, termasuk bagaimana berbagai program sosialisasi dan pendidikan politik oleh Kesbangpol dapat mengatasi tantangan ini. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menawarkan rekomendasi yang lebih terfokus pada pengembangan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap karakteristik demografis dan sosial generasi milenial di daerah tersebut.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa salah satu faktor penghambat utama dalam meningkatkan partisipasi politik generasi milenial di Kabupaten Mimika adalah penyebaran berita hoaks yang masif melalui media sosial. Hoaks ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan generasi milenial terhadap informasi politik yang mereka terima, yang pada akhirnya menurunkan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Septiadi dkk. (2020) yang juga menyoroti dampak negatif dari berita hoaks terhadap partisipasi politik. Namun, penelitian ini lebih mendetailkan bagaimana hoaks tersebut menyebar dan berinteraksi dengan pola komunikasi lokal di Kabupaten Mimika, serta bagaimana kurangnya literasi digital di kalangan milenial memperparah masalah ini. Kesbangpol telah mencoba mengatasi masalah ini melalui program pendidikan politik dan kampanye literasi digital, namun dampaknya masih terbatas karena kompleksitas tantangan yang dihadapi.

Faktor penghambat lainnya yang ditemukan adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik generasi milenial. Meskipun Kesbangpol telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong partisipasi politik, kurangnya dukungan dari institusi lain, seperti sekolah dan organisasi masyarakat, menghambat efektivitas inisiatif tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian oleh Potehadi (2019) yang menemukan bahwa kolaborasi antar-institusi sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik milenial. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Mimika, kurangnya keterlibatan aktif dari institusi-institusi pendukung mengakibatkan inisiatif yang diluncurkan oleh Kesbangpol tidak mencapai audiens yang lebih luas dan beragam. Kesimpulan ini menekankan pentingnya memperkuat kerjasama lintas sektoral dan meningkatkan kesadaran di berbagai lapisan masyarakat untuk mendukung partisipasi politik generasi milenial secara lebih efektif.

IV. KESIMPULAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dapat meningkatkan partisipasi politik generasi millennial dengan menerapkan langkah-langkah berikut:

Kesbangpol di Kabupaten Mimika dapat meningkatkan keterlibatan politik generasi millennial dengan menyelenggarakan pendidikan politik, memanfaatkan teknologi, berkolaborasi dengan berbagai pihak, memberdayakan melalui pelatihan, serta mengakomodasi ide dan aspirasi mereka. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif generasi millennial dalam proses politik dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kemajuan daerah.

Faktor pendukung dari strategi Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik generasi millennial di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, termasuk ketersediaan sumber daya, kerjasama dengan pihak terkait, dan pemanfaatan teknologi yang ada. Namun, terdapat juga beberapa hambatan seperti keterbatasan akses, rendahnya kesadaran politik, ketidaksetujuan terhadap perubahan, serta masalah keamanan dan stabilitas yang dapat menghambat upaya tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan geografis yang terbatas hanya pada Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sehingga temuan mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain dengan karakteristik demografis dan sosial-politik yang berbeda. Kedua, metode pengumpulan data yang sebagian besar menggunakan survei dan wawancara mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kompleksitas partisipasi politik generasi milenial, karena ada kemungkinan bias responden dalam memberikan jawaban yang dianggap sosial diharapkan. Ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya mengakibatkan kurangnya pendalaman dalam analisis faktor-faktor eksternal, seperti pengaruh kebijakan pemerintah pusat dan dinamika politik nasional, yang juga dapat mempengaruhi partisipasi politik di tingkat lokal. Terakhir, keterbatasan literatur yang spesifik terkait partisipasi politik milenial di Papua Tengah membuat perbandingan dengan penelitian terdahulu menjadi kurang representatif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk mengembangkan penelitian ini di masa mendatang, ada beberapa arah yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, penting untuk memperluas cakupan penelitian ke daerah lain di Papua Tengah atau bahkan provinsi lain di Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang partisipasi politik generasi milenial di berbagai konteks sosial-politik. Kedua, integrasi metode penelitian yang lebih diversifikasi, seperti analisis data besar (*big data*) dari platform media sosial dan survei online, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perilaku politik generasi milenial. Selain itu, mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang lebih mendalam, seperti pengaruh globalisasi dan teknologi terhadap partisipasi politik, dapat memberikan wawasan tambahan dalam merancang strategi untuk meningkatkan keterlibatan politik generasi milenial secara efektif di masa depan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman dan pengembangan partisipasi politik generasi milenial di Kabupaten Mimika. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aryandono, K. K. T., Heryanda, K. K., & Telagawathi, N. L. W. S. (2024). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, *11*(1). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v11i1.54417>
- Bagus Adnyanaesa, P., & Utama, W. (2023). Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda. *Jurnal Dikemas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *7*(1).
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Kencana*.
- Dhany Asmara Hidayat, Osly Usman, & Rizki Firdausi Rachmadania. (2023). ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS PADA SUKUBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JAKARTA UTARA. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, *1*(3). <https://doi.org/10.59024/jise.v1i3.195>
- Dr.Sudaryono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Methode. *Depok: PT RajaGrafindo Persada*.
- Hakim, L., & Dewanti, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration Journal*, *4*(1).
- Huljana, Y. M., & Baharudin, I. (2022). Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Johan Pahlawan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, *3*(2). <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.1-12>
- L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).
- Mulyana, M., & Tambunan, C. J. (2021). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KABUPATEN MERAUKE. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2259>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Nurfitriana, N., Yusuf, M., & Berlian, O. (2021). Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. *@-Publik: Jurnal Administrasi Publik*, *1*(1). <https://doi.org/10.37858/publik.v1i1.194>

- Nurhayati, D., Winarno, & Nuryadi, M. H. (2023). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Melalui Pendidikan Politik Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 1(2). <https://doi.org/10.61476/sqagb315>
- Pelealu, R. R., Nayoan, H., & Sampe, S. (2022). Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Governance*, 2(2).
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Setiawan, M., Ramdhani, H., & Darmawan, C. (2020). STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(3). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i3.1044>

